

**PRAKTIK PERSENGKONGKOLAN PADA PENGADAAN PEKERJAAN
PEMBANGUNAN SISTEM PERSINYALAN ELEKTRIK JALUR GANDA
KERETA API LINTAS BOGOR-CICURUG**

ABSTRAK

(Putusan Nomor 18/KPPU-L/2022)

Wardi

Menggunakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini bersifat preskriptif serta di analisa dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif setelah dilakukan pengumpulan data melalui kepustakaan. Bahwa Indonesia telah memasuki dunia teknologi digital, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam rangka mengurangi indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di pemerintahan maka proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui media elektronik. Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Prinsip yang perlu diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel. Untuk memenuhi prinsip tersebut maka diperlukan sistem pengawasan yang maksimal, sehingga kemudian perlu adanya sistem audit yang juga berbasis elektronik untuk memudahkan aparat pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan secara real time. Adanya indikasi persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, maka diperlukan peran pemerintah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab, maka adanya lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga menjadi salah satu lembaga yang berwenang dalam menjaga stabilitas pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan oleh para pihak yang diduga telah melakukan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa melalui sarana tender dan media elektronik. Adapun indikasinya diantaranya adanya kesamaan IP Address, kesamaan metadata, kesamaan penawaran, kemiripan lokasi akses dan lain sebagainya. Bentuk sanksi yang diberikan oleh KPPU adalah denda yang akan dibebankan kepada para Terlapor yang terbukti bersalah melakukan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Kata Kunci: barang/jasa, pengadaan, persekongkolan.

***CONSPIRACY PRACTICES IN THE PROCUREMENT OF WORK FOR THE
CONSTRUCTION OF AN ELECTRIC SIGNALING SYSTEM FOR THE
DOUBLE TRACK RAILWAY BETWEEN BOGOR AND CICURUG.***

ABSTRACT

(Decision Number 18/KPPU-L/2022)

Wardi

Using normative legal research with a statutory approach and a case approach, this research is prescriptive and analyzed using descriptive qualitative methods after collecting data through the literature. That Indonesia has entered the world of digital technology, including in terms of procurement of government goods and services. To reduce indications of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in government, the procurement process for goods and services is carried out through electronic media. Ethics in the procurement of goods and services is good behavior from all parties involved in the procurement process. The principles that need to be applied in the procurement of goods and services include efficiency, effectiveness, transparency, openness, competition, fairness/non-discrimination, and accountability. To fulfill this principle, a maximum supervision system is needed, so that there is a need for an electronic-based audit system to make it easier for inspection officials to carry out inspections in real time. There are indications of bid rigging in the electronic procurement of government goods and services, so the government's role as a form of responsibility is needed, so the existence of the Business Competition Supervisory Commission is also one of the institutions authorized to maintain the stability of the procurement of goods and services in Indonesia. Dispute resolution through the Business Competition Supervisory Commission is carried out by parties suspected of having committed fraud in the procurement of goods and services through tenders and electronic media. The indications include similar IP addresses, similar metadata, similar offers, similar access locations and so on. The form of sanction given by the KPPU is a fine that will be imposed on the Reported Parties who are proven guilty of conspiring in the procurement of these goods and services.

Keyword: goods/services, procurement, conspiracy.